

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR ARTO MORO
TAHUN 2023**



**Jl. Elang Raya No 99 Kelurahan Mangunharjo - Tembalang Kota
Semarang
TELEPON: 024-76606993**



BAB I

PENJELASAN UMUM

Manajemen PT BPR ARTO MORO berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola, namun masih dibutuhkan waktu dan pentahapan di dalam penyiapan struktur dan infrastrukturnya.

Laporan pelaksanaan tata kelola di PT BPR ARTO MORO disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2023 :

- A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
- D. Penanganan Benturan Kepentingan
- E. Penerapan Fungsi Kepatuhan
- F. Penerapan Fungsi Audit Intern
- G. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
- H. Batas Maksimum Pemberian Kredit
- I. Rencana Bisnis
- J. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

BPR ARTO MORO telah melakukan penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2023 dengan meliputi 10 faktor, dikarenakan Modal Inti dibawah Rp. 50.000.000.000 dan menyampaikan Hasil Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	DARMAWAN, S.Sos
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. 2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana di atur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. 3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) bersama dengan Dewan Komisaris dan Direksi. 5. Melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah disusun dan apabila terdapat perubahan akan meminta persetujuan Dewan Komisaris. 6. Menjaga Ratio Tingkat Kesehatan Bank. 7. Menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, Otoritas Jasa Keuangan dan / atau otoritas lainnya. 8. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi manajemen resiko dan fungsi kepatuhan. 9. Menerapkan fungsi manajemen risiko yang mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR. 10. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab pada setiap unit kerja. 11. Meningkatkan ketrampilan dan profesionalisme sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPR secara optimal untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas / produktivitas yang telah ditetapkan. 12. Menandatangani surat-surat berharga dan dokumen penting perusahaan baik sendiri ataupun bersama dengan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan yang ada. 13. Menandatangani Surat Keputusan Direksi secara sendiri atau bersama-sama yang meliputi mutasi, promosi dan pemberhentian karyawan. 14. Menandatangani laporan-laporan Bank yang penting khususnya Laporan kepada Otoritas dan pihak ekstern. 15. Mengendalikan dan mengawasi tugas-tugas pemberian persetujuan kredit, pengelolaan sumber daya manusia, pengawas dan pendanaan Bank.		
2.	Nama	:	Ruspito Nugroho
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan dalam rangka		

pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari POJK dan/atau peraturan perundang-undangan lain

- a. Menyiapkan prosedur kepatuhan pada setiap satuan kerja
- b. Menyesuaikan pedoman intern BPR terhadap perubahan peraturan perundang – undangan.
- c. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundangundangan;
- d. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- e. Memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan atau keputusan yang menyimpang dari peraturan OJK dan atau peraturan perundang-undangan lain.
- f. Memantau dan memahami perkembangan ketentuan OJK dan peraturan perundang – undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR.
- g. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- h. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- i. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- j. verifikasi atas permohonan kredit beserta dokumennya
- k. review dan atau rekomendasi atas permohonan kredit.

2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang – undangan antara lain melalui :

- a. Memantau penerapan prosedur kepatuhan pada setiap satuan kerja yang digunakan sebagai alat dalam pengambilan keputusan yang dilakukan
- b. Memastikan bahwa semua aktivitas bank telah dilakukan dengan mematuhi peraturan perundang – undangan, perjanjian dan komitmen dengan OJK, serta peraturan internal yang berlaku.
- c. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang undangan lain yang relevan. Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

3 Menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, Otoritas Jasa Keuangan dan / atau otoritas lainnya.

4 Mewakili Direktur Utama apabila berhalangan hadir.

5 Merencanakan, menyusun, melaksanakan Rencana Bisnis Bank dan mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan operasional Bank.

6 Membuat standar operasional Bank mengenai semua kegiatan operasional, produk-produk dan ketentuan-ketentuan baru.

7 Menjaga Ratio Tingkat Kesehatan Bank

8 Menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, Otoritas Jasa Keuangan dan / atau otoritas lainnya.

9 Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

10 Menyelenggarakan dan mempersiapkan laporan yang akan digunakan dalam rapat Direksi dan Komisaris.

11 Meneliti kebenaran dan kelengkapan atas Laporan Keuangan Bank.

12 Meneliti kebenaran dan mengawasi semua pengeluaran biaya-biaya operasional.

13 Melakukan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan operasional Bank

14 Melakukan pengawasan serta penilaian terhadap efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tata kerja sesuai dengan ketentuan organisasi.

15 Mengangkat dan memberhentikan karyawan atas usulan dari kepala bidang unit kerja / bagian personalia, dan akan dipertimbangkan bersama Direktur Utama.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris terkait :

1. Temuan Satuan Audit Intern
2. Temuan Audit Ekstern

3. Hasil Pengawasan Dewan Komisaris
4. Temuan Otoritas Jasa Keuangan dan/ Otoritas Lain
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Prof. Dr. H Subyakto, SH, MH, MM
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Sebagai pusat komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta pemegang saham 2. Memastikan bahwa Dewan Komisars senantiasa diberi informasi mengenai hal-hal yang relevan dan bimintakan persetujuan yang diperlukan 3. Bertanggung jawab memimpin Dewan Komisaris guna menjamin efektivitas fungsi Dewan Komisaris 4. Bertanggung jawab untuk menentukan agenda rapat dan memimpin rapat 5. Komisaris Utama menentukan keadaan mendesak dalam hal undangan rapat Dewan Komisaris 6. Komisaris Utama menentukan keadaan informasi dilakukan dalam waktu kurang dari 3 hari 7. Memastikan agar para Komisaris mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas 8. Membina hubungan yang konstruktif antara Dewan Komisaris dan Direksi		
2.	Nama	:	Slamet Arisno, SH
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantay dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik, termasuk persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank 2. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya 3. Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui rencana bisnis bank 4. Bersama-sama dengan Komisaris Utama dan menyetujui laporan tahunan 5. Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada laporan Pengawasan Dewan Komisaris 6. Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan 7. Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris dan rapat komite terkait 8. Menghadiri rapat Pemegang Saham 9. Memberikan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektifitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau laporan kinerja 10. Mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta strandar yang relevan		
Rekomendasi Kepada Direksi :			
Dewan Komisaris Merekomendasikan kepada Direksi : 1. Temuan Satuan Audit Intern 2. Temuan Audit Ekstern 3. Hasil Pengawasan Dewan Komisaris 4. Temuan Otoritas Jasa Keuangan dan/ Otoritas Lain			
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Bank memiliki Modal Inti kurang dari Rp. 50.000.000.000	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	Modal Inti kurang dari Rp. 50.000.000.000	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-

Penjelasan Lebih Lanjut

belum adanya penerapan komite audit dikarenakan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	DARMAWAN, S.Sos	Rp0	0%
2.	Ruspito Nugroho	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
nihil			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	DARMAWAN, S.Sos	-	-	0%
2.	Ruspito Nugroho	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Nihil				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	DARMAWAN, S.Sos	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ruspito Nugroho	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak memiliki hubungan keuangan anggota Direksi pada BPR				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham

1.	DARMAWAN, S.Sos	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ruspito Nugroho	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak memiliki hubungan keluarga Anggota Direksi pada BPR				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Prof. Dr. H Subyakto, SH, MH, MM	Rp6.730.000.000	94.39%
2.	Slamet Arisno, SH	Rp200.000.000	2.81%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR Arto Moro : - Dr. H Subyakto, SH, MH, MM merangkap Pemegang Saham Pengendali dengan kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris sebanyak 6.730 lembar saham sebesar Rp. 6.730.000.000 - Slamet Arisno, SH merangkap sebagai Pemegang Saham dan Komisaris sebanyak 200 lembar saham sebesar Rp. 200.000.000			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Prof. Dr. H Subyakto, SH, MH, MM	-	-	0%
2.	Slamet Arisno, SH	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
nihil				

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Prof. Dr. H Subyakto, SH, MH, MM	Tidak ada	Tidak ada	Hj. Ria Kusumawardhani, SH, M.Kn. - Istri
2.	Slamet Arisno, SH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				

Tidak ada hubungan keuangan antara Bapak Subyakto dengan Bapak Slamet Arisno tidak memiliki hubungan keuangan

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Dr. H Subyakto, SH, MH, MM	Tidak ada	Tidak ada	Hj. Ria Kusumawardhani, SH., M.Kn - Istri Pemegang Saham Pengendali dan Komisaris Utama
2.	Slamet Arisno, SH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Masing- masing Anggota Dewan Komisaris tidak ada hubungan keluarga, namun salah satu anggota Dewan Komisaris memiliki Hubungan Keluarga dengan salah satu Pemegang Saham, serta Pemegang Saham Pengendali merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp445.350.000	2	Rp291.340.920
2.	Tunjangan	2	Rp150.000.000	2	Rp42.000.000
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp595.350.000		Rp333.340.920
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Perubahan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi telah ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 11 Januari 2023					
Perbandingan antara Gaji Direksi dengan Dewan Komisaris lebih besar gaji Direksi					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil (2)	Mobil (1)
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2)	BPJS Kesehatan (2)
4.	Fasilitas Lainnya	BBM (66000000)	BBM (30000000)
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Seluruh Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris telah ditetapkan berdasarkan RUPS tanggal 11 Januari 2023 dan tidak ada pelampauan dalam penggunaan fasilitas tersebut.			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4.25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1.93 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Gaji Tertinggi Dewan Komisaris : Komisaris Utama Gaji Tertinggi Direksi adalah Gaji Direktur Utama Gaji Karyawan Tertinggi : Karyawan tetap dengan masa kerja lebih dari 10 tahun dengan jabatan kepala bagian Bisnis Gaji Karyawan Terendah : karyawan kontrak dengan masa kerja lebih dari tiga bulan	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	12 Januari 2023	2	Evaluasi Kinerja Perbankan Triwulan IV Evaluasi Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Audit OJK dan SKAI Pembahasan terkait Dana Linkage dari Bank Lain Dana Kredit Usaha Rakyat dan Kementerian Perekonomian

2.	11 April 2023	2	1. Evaluasi Kinerja Bank Triwulan I tahun 2023 2. Evaluasi Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Audit Otoritas Jasa Keuangan 3. Evaluasi Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, APU PPT dan Manajemen SDM
3.	12 Juli 2023	2	1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank sampai dengan bulan Juni 2022 2. Evaluasi Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Audit Otoritas Jasa Keuangan 3. Evaluasi Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, APU PPT, dan Manajemen Sumber Daya Manusia
4.	14 Agustus 2023	5	1. Evaluasi Kinerja Bank Triwulan II tahun 2023 2. Evaluasi Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Audit Otoritas Jasa Keuangan 3. Evaluasi Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, APU PPT, dan Manajemen Sumber Daya Manusia
5.	04 November 2023	15	1. Penyusunan Rencana Bisnis Bank tahun 2024 2. Pembahasan Tindak lanjut Konfirmasi Hasil Pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Komitmen dari seluruh bagian
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris telah dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi - Undangan rapat Dewan Komisaris telah tersampaikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi 			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Prof. Dr. H Subyakto, SH, MH, MM	4	0	100%
2.	Slamet Arisno, SH	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
<ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran Rapat Anggota Dewan Komisaris telah di tandatangani oleh seluruh peserta rapat - Undangan Rapat Anggota Dewan Komisaris telah diterima oleh peserta Rapat - Rapat Anggota Dewan Komisaris di tahun 2023 telah dihadiri oleh seluruh peserta rapat 				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Nihil								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	2	0
Dalam Proses Penyelesaian	4	0
Total	6	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
<p>Perdata :</p> <p>1. BPR sebagai Tergugat : Penggugat (debitur Slamet Pujiyanto) menggugat bank karena tidak terima atas tindakan bank yang melakukan lelang terhadap agunan pinjaman kredit.</p> <p>2. BPR sebagai kreditur Separatis : Debitur Herman Johannes dinyatakan berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 16/Pdt.Sus-Pailit/PN.Niaga Smg Jo. 16/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Smg tanggal 3 November 2023.</p> <p>3. BPR Arto Moro sebagai Tergugat I : Penggugat yaitu Masudah selaku istri dari Debitur Karsin (almarhum) mendalilkan Tergugat I (Bank) melakukan penyalahgunaan keadaan dengan alasan memaksa debitur melakukan perjanjian dalam keadaan sakit dan menganggap perjanjian kredit yang ditandatangani adalah perjanjian baku sehingga bertentangan dengan hukum.</p> <p>4. BPR Arto Moro sebagai Tergugat III: Ari Soebagio, dkk selaku Penggugat I-V merasa dirugikan oleh Pengembang (Alm Sutoyo) karena merasa sudah melakukan pembayaran pembangunan rumah tetapi pekerjaan tidak diselesaikan dan sertifikat tidak diserahkan. Pengembang yang merupakan debitur BPR Arto Moro kemudian meninggal dunia sehingga Penggugat menuntut ahli waris untuk menyelesaikan kewajiban dari almarhum. Penggugat I-V meskipun tidak mempunyai hubungan hukum dengan bank kemudian juga menggugat bank agar menyerahkan SHM yang saat ini menjadi agunan kredit dari debitur.</p> <p>5. BPR sebagai Tergugat V: Penggugat merasa dirugikan oleh pengembang karena sudah melakukan pembelian rumah kepada pengembang dengan cara mengangsur tetapi tidak diberikan sertifikat rumah tersebut. Penggugat juga turut menggugat BPR Arto Moro karena sertifikat rumah yang dinyatakan sudah dibeli tersebut menjadi agunan kredit di bank.</p> <p>BPR Arto Moro menyatakan tidak ada hubungan hukum dengan para Penggugat dan menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan proses persetujuan kredit sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku.</p> <p>6. BPR Arto Moro sebagai kreditur Separatis : Debitur Pradnya Pradipta Ramadhana dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (dalam PKPUS) dalam waktu paling lama 45 hari sejak tanggal putusan 30 November 2023.</p>		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.	Prof. Dr. Subyakto, SH. MH. MM	Pemegang Saham Pengendali	Darmawan, S.Sos	Direktur Utama	sewa menyewa Kantor Kas Bulusan	115 juta rupiah	Sewa Kantor Kas Bulusan sudah mempertimbangan persyaratan

							yang diperlukan seperti adanya data pembanding, penentuan harga wajar, lokasi kantor yang strategis, serta prospek pasar yang baik di wilayah kantor kas bulusan
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Sewa Kantor Kas Bulusan sudah mempertimbangkan persyaratan yang diperlukan seperti adanya data pembanding, penentuan harga wajar, lokasi kantor yang strategis, serta prospek pasar yang baik di wilayah kantor kas bulusan							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	15 September 2023	Sosial	Kegiatan santunan anak yatim	Anak Yatim Piatu	Rp42.947.000
2.	23 November 2023	Sosial	Kegiatan sumbangan sponsorship Dana Pensiun Satya Wacana	Dana Pensiun Satya Wacana	Rp1.250.000
3.	24 Mei 2023	Sosial	Kegiatan partisipasi doorprize Hari -BPR-BPRS Nasional	Perbarindo	Rp3.000.000
4.	04 Agustus 2023	Sosial	Sumbangan kegiatan HUT Kemerdekaan RI	Warga Sekitar Lingkungan Kantor	Rp4.500.000
5.	11 Juli 2023	Sosial	Kegiatan sumbangan hewan qurban Masjid Jamik Baitul Munzi	Masjid Jamik Baitul Munzi	Rp15.500.000
6.	29 Desember 2023	Sosial	Kegiatan pembelian nasi bungkus untuk jumat berkah	Warga Lingkungan Sekitar Kantor	Rp176.025.500
7.	29 Desember 2023	Sosial	Kegiatan pembuatan karangan bunga untuk nasabah dan karyawan	Nasabah , Karyawan	Rp32.910.000
8.	29 Desember 2023	Sosial	Kegiatan sumbangan untuk karyawan	Karyawan	Rp99.899.001
9.	03 Agustus 2023	Sosial	Kegiatan sumbangan untuk masjid	Masjid Lingkungan Sekitar Kantor	Rp7.750.000
10.	20 Mei 2023	Sosial	Kegiatan sumbangan untuk Pondok Pesantren	Pondok Pesantren	Rp14.000.000



PT BPR Arto Moro

Jl. Elang Raya No 99 Kelurahan Mangunharjo - Tembalang Kota Semarang

Telepon: 024-76606993

Website: www.bprartomoro.co.id. Email: bpr_artomoro@yahoo.com

11.	14 April 2023	Sosial	Kegiatan pembagian Takjil di Bulan Ramadhan	Warga lingkungan sekitar kantor	Rp12.725.000
12.	29 Desember 2023	Sosial	Kegiatan sumbangan untuk TK Islam Nurul Falah	TK Islam Nurul Falah	Rp52.500.000
13.	02 November 2023	Sosial	Kegiatan sumbangan untuk TPQ Plus Al-Qodar	TPQ Plus Al-Qodar	Rp11.500.000
14.	10 Januari 2023	Sosial	Kegiatan sumbangan untuk korban banjir di Meteseh Semarang	Warga Wilayah Meteseh Semarang	Rp12.912.050
15.	27 Desember 2023	Sosial	Kegiatan pembagian sembako warga sekitar	Warga lingkungan sekitar kantor	Rp82.100.518
16.	06 April 2023	Sosial	Kegiatan sumbangan sembako warga tengger	Warga Tengger	Rp27.407.150
17.	02 Desember 2023	Sosial	Kegiatan sumbangan Yayasan Pendidikan Islam	Yayasan Pendidikan Islam	Rp45.150.000

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Sumbangan selama tahun 2023 dikeluarkan untuk sumbangan pembangunan masjid, Qurban
Sumbangan rutin setiap bulan berupa pembagian sembako kepada warga sekitar kantor dan panti asuhan
Sumbangan rutin diberikan juga kepada yayasan Islam Nurul Falah yang digunakan untuk pembayaran tenaga pengajar TPQ dan staff

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR Arto Moro
Alamat	: Jl. Elang Raya No 99 Kelurahan Mangunharjo - Tembalang Kota Semarang
Nomor Telepon	: 024-76606993
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp38.705.585.343
Total Aset	: Rp1.161.851.012.037

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR Arto Moro Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2.3 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.02	0.404
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.00	0.300
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	3.00	0.300
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.70	0.270
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.10	0.210
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.00	0.050
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.45	0.245
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	3.05	0.229
10	Rencana Bisnis BPR	2.00	0.150
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.25	0.169
Nilai Komposit			2.300
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.02)

Jumlah Direksi sesuai dengan struktur organisasi Tata kelola BPR minimal 2 Direksi baru terpenuhi di bulan November 2022

Terdapat Tenaga medis yang belum masuk dalam Struktur Organisasi

Hasil rapat Direksi belum tertuang dalam notulen

belum terdapat evaluasi terhadap debitur-debitur besar terutama kredit property

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2)

Risalah rapat Dewan Komisaris belum sepenuhnya membahas mengenai evaluasi penerapan tata kelola BPR yaitu :

pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris

Penanganan Benturan Kepentingan

Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, Audit Ekstern

Penerapan Manajemen risiko termasuk pengendalian intern

batas maksimum pemberian kredit

transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Bank belum menerapkan komite audit dikarenakan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 3)

terdapat hubungan keluarga antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham

terdapat transaksi dengan Pemegang Saham Pengendali berupa Sewa Kantor Kas Bulusan Tembalang senilai Rp. 115 juta per tahun

rekrut tenaga medis yang merupakan pihak terkait dengan PSP dan Komisaris Utama

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.7)

terdapat kelemahan dalam pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan

belum adanya review, pengkinian dan penyesuaian ketentuan internal dengan peraturan yang berlaku

belum adanya sosialisasi berkelanjutan terhadap pegawai terkait peraturan yang berlaku

tidak adanya evaluasi terkait kelemahan dalam pelaksanaan aktivitas operasional bank

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.1)

Pelaksanaan fungsi audit intern belum sepenuhnya sesuai dengan POJK penerapan Tata Kelola BPR

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

dalam tahap pelaksanaan audit KAP

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.45)

Bank telah memiliki pedoman penerapan manajemen risiko dan penetapan limit risiko akan tetapi belum

dilakukan evaluasi terhadap pelampauan limit risiko sistem informasi / CBS yang dimiliki telah memunculkan aspek risiko akan tetapi belum per aktivitas kegiatan BPR

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 3.05)

terdapat pelampauan BMPK namun Bank telah mengelola pihak tidak terkait untuk melakukan pembayaran pinjaman

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)

Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.25)

masih terdapat kesalahan pada sandi pelaporan

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Baik

Semarang, 22 Januari 2024

PT BPR Arto Moro

Disiapkan



Riska Irmananingtyas

PE Kepatuhan, Manrisk dan APU PPT

Disetujui



Darmawan. S.Sos

Direktur Utama



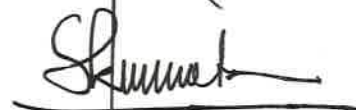
Disetujui



Ruspito Nugroho

Direktur & Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Mengetahui



Prof. Dr. H Subyakto, SH, MH, MM

Komisaris Utama